

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Australia adalah sebuah negara berparlemen yang merupakan anggota persemakmuran dari Inggris. Luas negara ini kurang lebih 76.000.000 km², yang beribukota di Canberra dan menggunakan mata uang Dollar Australia.¹ Negara ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Negara ini termasuk dalam monarkhi parlementer-demokratis federal dalam lingkup Persemakmuran di Pasifik.²

Australia adalah suatu benua yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah selatannya terletak Antartika dan di sebelah barat lautnya terletak Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahwa letak Australia menyendiri dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, namun kalau diperhatikan letaknya lebih dekat dengan negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya.³ Australia jelas berbeda dengan negara-negara di sekitarnya, apalagi jika dilihat dari penduduknya yang secara fisik sangat berbeda dengan penduduk di wilayah sekitarnya, seperti penduduk di negara-negara

¹ Et all, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus Suplemen*, Jakarta: Uitgeverij W. Van Hoeve B.V., 1986, hlm. 108.

² Et all, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus Suplemen*, Jakarta: Uitgeverij W. Van Hoeve B.V., 1990, hlm. 89.

³ Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 3.

kawasan Asia Tenggara. Karena secara ras, penduduk Australia merupakan keturunan dari ras kaukasoid⁴.

Secara topografi⁵, Australia merupakan benua terkecil, sebelah timur berbatasan dengan Samudera Pasifik (Laut Koral dan Laut Tasman), dan lainnya dikitari oleh Samudera Indonesia, meliputi negara Federal Australia, *Commonwealth of Australia*, termasuk juga Pulau Tasmania yang terletak dekat pantai sebelah tenggara Pulau Norfolk di Samudera Pasifik, Kep. Cocos (Keeling), dan Pulau Christmas di Samudera Indonesia, Antartika Australia dan sejumlah gugusan pulau lain, termasuk pemerintahan Australia, tetapi tidak bergabung dengan federasi. Australia mempunyai bentuk kompak dan membundar tanpa lekuk-lekuk dalam pada pantai. Australia beriklim subtropis. Hujan sangat kurang di pedalaman, sehingga beriklim gurun dan gurun pasir, banyak daerah yang sangat luas menampung hujan dari 250 mm setahun. Negara persemakmuran terdiri dari 8 negara bagian.⁶

Seperti yang sudah diutarakan di atas, bahwa Australia ini letaknya lebih dekat dengan Indonesia. Sebagai negara yang berdekatan tentunya terjadi interaksi antara keduanya, seperti terjalin hubungan kerja sama. Hubungan antara Australia

⁴ Ras kaukasoid adalah golongan manusia yang mempunyai ciri-ciri fisik tertentu, yaitu kulit pucat, tinggi badan sedang sampai jangkung, rambut lurus sampai berombak, badan biasanya berbulu, mata biru muda sampai coklat tua, hidung biasanya mancung. Lihat: Et All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, hlm. 517.

⁵ Kajian atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah. Lihat: *Ibid.*, hlm. 1207.

⁶ Et All, *Ensiklopedia Indonesia I A-CER*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980, hlm. 325-326.

dengan Indonesia sendiri mengalami pasang surut tetapi, tidak dapat dipungkiri juga dalam hal interaksi ini sering terjadi gesekan-gesekan yang tidak sedikit menimbulkan ketegangan dalam hubungan keduanya.

Seorang pakar Indonesia berbasis Australia, Colin Brown, pernah menyebutkan bahwa hubungan Australia-Indonesia itu bagaikan komidi putar (*roller-coaster*), artinya bergerak berundak-undak atau berputar, sehingga jika ada langkah naik (*upturn*) yang dihasilkan akan diikuti oleh penurunan (*downturn*) lainnya. Pola hubungan yang *erratic* itu memang realitas yang tidak terbantah karena terjadi dari waktu ke waktu. Terkadang hubungan antara keduanya bisa terlihat *mesra* sekali, namun terkadang bisa terlihat bagai dua lawan yang saling ingin menghancurkan.

Hubungan antara keduanya sudah terjalin sejak zaman yang paling awal, yaitu dimulai sejak awal pada zaman pelayaran. Kemudian disusul pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa agresi militer Belanda. Disitu terlihat bahwa Australia memberikan dukungan moral terhadap perjuangan bangsa Indonesia baik pada masa perjuangan kemerdekaan dan dalam mempertahankan kemerdekaan dari incaran Belanda.

Pada periode berikutnya, hubungan antara keduanya mengalami penurunan dengan adanya masalah Irian Barat dan politik konfrontasi yang dilancarkan Indonesia terhadap Malaysia. Di sini sikap Australia kembali diuji dalam menghadapi politik Indonesia. Sepanjang perjalanan hubungan keduanya, Australia berhati-hati sekali dalam menentukan kebijakannya terhadap Indonesia.

Terlihat dengan adanya Australia tidak menerapkan sikap kerasnya terhadap Indonesia.

Setelah Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru dan menghapus politik konfrontasinya terhadap Malaysia, hubungan antara Australia dengan Indonesia pun kembali membaik. Hubungan baik ini terjadi ketika Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dan Australia di bawah pemerintahan Gough Whitlam. Hubungan keduanya kembali terjadi gesekan ketika muncul isu mengenai integrasi Timor Timur. Bagi Australia, Indonesia dianggap terlalu agresif dalam proses penyatuan ini dan dianggap banyak melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Padahal saat itu hubungan antara keduanya bisa dikatakan sangat mesra, terbukti dengan adanya kerja sama yang dijalani keduanya dalam berbagai bidang.

Di sinilah yang dianggap menarik oleh penulis, sehingga penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul Hubungan Antara Australia dengan Indonesia Pada Masa Perdana Menteri Gough Whitlam (1972-1975). Dalam kurun waktu tersebut, terlihat hubungan yang unik antara Australia dengan Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran secara jelas dan sistematis, sehingga akan mudah dipahami dengan jelas dari permasalahan yang sebenarnya. Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan Australia dengan Indonesia pada era sebelum pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam?
2. Bagaimana peran Gough Whitlam dalam dunia politik bersama Partai Buruh sebelum menjadi Perdana Menteri Australia?
3. Bagaimana hubungan antara Australia dengan Indonesia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam (1972-1975)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum
 - a. Untuk melatih berpikir secara kritis, analitis, sistematis dan obyektif dalam menulis karya sejarah.
 - b. Sebagai wujud penerapan metodologi penelitian sejarah kritis yang telah dipelajari semasa perkuliahan.
 - c. Memperkaya wawasan kesejarahan.
2. Tujuan khusus
 - a. Mengetahui hubungan Australia dengan Indonesia pada era sebelum pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam.
 - b. Mengetahui peran Gough Whitlam dalam dunia politik bersama Partai Buruh sebelum menjadi Perdana Menteri Australia.
 - c. Memahami dan mengerti hubungan antara Australia dengan Indonesia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam (1972-1975).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar bermanfaat baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Terutama sekali untuk mendapatkan gambaran objektif tentang permasalahan yang dikemukakan.

1. Bagi pembaca
 - a. Melalui tulisan skripsi ini diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai hubungan Australia dengan Indonesia pada era sebelum pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam.
 - b. Pembaca juga diharapkan dapat mengetahui peran Gough Whitlam dalam dunia politik bersama Partai Buruh sebelum menjadi Perdana Menteri Australia.
 - c. Pembaca dapat mengetahui hubungan antara Australia dengan Indonesia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam (1972-1975).
2. Bagi Penulis
 - a. Sebagai indikator terhadap kemampuan penulis dalam meneliti hubungan Australia dengan Indonesia pada era sebelum pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam.
 - b. Menambah wawasan mengenai peran Gough Whitlam dalam dunia politik bersama Partai Buruh sebelum menjadi Perdana Menteri Australia.

- c. Sebagai sarana untuk memperkaya pengetahuan mengentahui hubungan antara Australia dengan Indonesia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam (1972-1975).

E. Kajian Pustaka

Sebenarnya hubungan antara Australia dengan Indonesia sudah terjalin sejak lama, yaitu sejak jaman masih primitif sekali. Hubungan antara keduanya dimulai pada jaman pelayaran, disini sudah ada kontak antara Suku Bugis (Indonesia) dan Suku Aborigin (Australia). Kontak ini terjadi sekitar tahun 1650-an, yang terbukti dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Suku Bugis juga dilakukan oleh Suku Aborigin atau pun sebaliknya.⁷

Hubungan keduanya berlanjut ketika Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, tapi tentunya hubungannya lebih kepada pemerintah kolonialnya bukan dengan masyarakat Indonesia saat itu. Ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dan ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda yang pertama dan kedua, rakyat Australia memberikan dukungan moral kepada bangsa Indonesia yang dirasa sangat berarti bagi rakyat Indonesia saat itu.⁸ Keterlibatan Australia dalam masalah bangsa Indonesia itu ditunjukkan dengan konsisten dan dengan menerapkan kebijakan yang radikal,

⁷ Sammi Sarasyiq, Lembaga Australia-Indonesia. *Hubungan antara Australia dan Indonesia*. <http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2011. Pukul 22.30 WIB.

⁸ Siboro J, *Sejarah Australia*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPLPTK, 1989, hlm. 166.

bahkan rakyat Indonesia pun mengakuinya dan sangat berterima kasih terhadap pemerintah Australia.⁹ Dalam masalah agresi militer Belanda itu, peran Australia bisa dikatakan cukup besar. Karena Australia juga berperan dalam penyelesaian masalah, baik terlibat dalam perjanjian Linggarjati, ataupun perjanjian Renville, hingga pada akhirnya Belanda mau mengakui kedaulatan Indonesia.

Hubungan keduanya mengalami perubahan ketika ada masalah mengenai Irian Barat yang pada akhirnya terintegrasi dalam wilayah Indonesia. Dimana pada tahun 1949, Perdana Menteri Evvat mengatakan bahwa Irian Barat bukanlah bagian dari Indonesia. Menurutnya, Irian bagian Australia dan bagian Belanda adalah integral dari wilayah Zona Pasifik.¹⁰ Sudut pandang Australia dalam masalah Irian Barat ini lebih diakibatkan oleh sudut pandang pertahanan. Dimana pulau ini (New Guinea) sangat penting bagi Australia dalam hal pertahanan dan dalam segi pembangunan politik ekonomi, serta adanya kekhawatiran keamanan Australia terhadap musuh yang datang dari Asia.¹¹ Apalagi saat itu juga dipengaruhi oleh kemenangan PKI di Indonesia yang menambah kekhawatiran Australia terhadap pengaruh perkembangan komunis.

Irian Barat menjadi wilayah Indonesia dengan diadakannya Pepera (penentuan pendapat rakyat) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli hingga bulan

⁹ Hilman Adil, *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-1962*, Jakarta: Djambatan, 1993, hlm. 30.

¹⁰ PBR de Geus, *Masalah Irian Barat: Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer*, Leiden: Yayasan Jaya Wijaya, 2003, hlm. 53-54.

¹¹ Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm. 164.

Agustus 1969.¹² Kemudian dikukuhkan oleh PBB dengan adanya Resolusi No. 2504 yang isinya adalah penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Irian Jaya di dalamnya.¹³ Selain masalah itu, Australia diduga ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi pada tahun 1958-1962. Dimana Australia berperan sebagai wilayah yang menjadi pangkalan dan sebagai tempat transit bagi pasukan Amerika yang memberikan bantuan senjata atau dalam melatih pasukan PRRI/Permesta di wilayah negara Asia Tenggara. Keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta juga didorong oleh adanya pendekatan yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Cina terhadap Indonesia dan juga mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat.¹⁴ Setelah masalah PRRI/Permesta ini selesai, kemudian disusul dengan adanya politik konfrontasi yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno terhadap Malaysia. Masalah ini sendiri berlangsung dari tahun 1962 hingga 1966, masalah ini berakhir dengan ditandai munculnya pemerintahan Orde Baru menggantikan Orde Lama.

Politik konfrontasi ini sendiri disebabkan oleh adanya kecurigaan Indonesia terhadap Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme di wilayah Asia Tenggara oleh Inggris yaitu dengan menyetujui pembentukan negara Federasi Malaysia. Indonesia melihat sebagai neokolonialisme baru, karena menurut Indonesia pembentukan federasi ini bukan atas kemauan warga Melayu. Hal itu terbukti

¹² Ridhani, *Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 240-242.

¹³ *Ibid.*, hlm. 245.

¹⁴ Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm. 227.

dengan adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Azahari dari Partai Rakyat Brunei yang pada akhirnya dapat dipadamkan. Politik konfrontasi ini berakhir dengan naiknya Presiden Soeharto sebagai pemimpin bangsa Indonesia menggantikan Presiden Soekarno melalui Supersemar. Hingga hubungan Australia dengan Indonesia pun kembali membaik sampai pada pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam.

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan sumber buku yaitu karya Hadi Soebadio yang berjudul *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*, buku karya Hilman Adil yang berjudul *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*, buku karya P.B.R. de Geus, yang berjudul *Masalah Irian Barat: Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer*, dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

Gough Whitlam dilahirkan di Kew, Melbourne, ayahnya bernama Fred Whitlam. Whitlam belajar di Knox Grammar School di Sydney dan di Canberra Grammar School, Whitlam kemudian belajar hukum di Universitas Sydney. Selama Perang Dunia II ia berdinasi sebagai penerbang di Skuadron No. 13 RAAF Angkatan Udara Australia, mencapai pangkat letnan penerbang. Ia menyelesaikan studinya setelah perang dan diterima di pengadilan New South Wales pada 1947 dan pada tahun 1942 menikah dengan Margareth Dovey.¹⁵

Whitlam memasuki dunia politik di Australia pada usianya yang ke-29, tepatnya pada tahun 1945. Kala itu, beliau bergabung dengan sebuah partai tertua

¹⁵ Gough Whitlam, http://www.whitlam.org/gough_whitlam
Diakses tanggal 5 Februari 2011. Pukul 22.00 WIB

di Australia yang masih berjalan hingga saat ini yaitu Partai Buruh Australia atau Australian Labour Party (ALP) pada era Ben Chifley.¹⁶ Partai Buruh Australia adalah partai politik tertua di Australia yang berdiri pada tahun 1891.¹⁷ Pada tahun 1972, bersama dengan Partai Buruh Australia, Whitlam mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri dan akhirnya ia menang. Whitlam memenangkan mayoritas suara dari Sembilan kursi di Dewan Perwakilan.¹⁸

Setelah memerintah, Whitlam ingin menjalankan politik luar negeri yang mandiri dan tidak mau menggantungkan diri kepada kekuatan asing. Adanya perubahan di kawasan sekitarnya mendorong Whitlam mendefinisikan kembali politik luar negeri Australia yang berlaku selama itu. Pernyataan tersebut menunjukkan keinginan Whitlam untuk mendefinisikan kembali politik luar negeri Australia dalam arti ingin menjalankan politik luar negeri bebas tidak hanya mengikuti politik luar negeri yang dijalankan sahabat besarnya, Amerika Serikat tanpa koreksi. Perdana Menteri Whitlam ingin agar Australia dapat menjalankan politik luar negeri sebagaimana layaknya Australia sebagai sebuah

¹⁶ Adrianus Waranei Muntu, Gough Whitlam dan perjalanan politiknya di Australia (1945-1978), 2009, <http://rinusmuntu.wordpress.com/2009/12/23/gough-whitlam-dan-perjalanan-politiknya-di-australia-1945-1978/>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2011. Pukul 22.30 WIB.

¹⁷ Kurian, George Thomas, *Facts On File National Profiles: Australia and New Zealand*, New York: Facts On File, 1990, hlm. 39.

¹⁸ National Library of Australia Cataloguing in Publication Data, *This Is Australia*, Sydney: Ure Smith, 1975, hlm. 164.

negara yang merdeka.¹⁹ Whitlam juga menerapkan strategi yang mengacu pada konsep “perimbangan kekuatan” dan strategi curahan gandum, yang pada pemerintahan sebelumnya menggunakan strategi *containment* dan *defense in depth*. Whitlam percaya bahwa perdamaian di kawasan sekelilingnya (Asia Tenggara) hanya dapat tercipta dengan kestabilan perimbangan kekuatan di antara negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut dan adanya kestabilan ekonomi yang baik.²⁰

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan sumber buku yaitu karya George Thomas Kurian, yang berjudul *Facts On File National Profiles: Australia and New Zealand*, buku yang berjudul *This Is Australia*, jurnal karya Edib Muslim, yang berjudul *Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Dari Whitlam Sampai Hawke, Dalam Jurnal Ilmu Politik*, dan sumber-sumber lainnya.

Selama masa jabatannya itu, hubungan antara Australia dengan Indonesia berjalan sangat baik. Hal itu terbukti dengan adanya kunjungan Negara oleh Perdana Menteri Gough Whitlam ke Indonesia pada tanggal 20-25 Februari 1973²¹, yang satu tahun sebelumnya, Presiden Soeharto juga telah melakukan

¹⁹ Adrianus Waranei Muntu, Gough Whitlam dan perjalanan politiknya di Australia (1945-1978), 2009, <http://rinusmuntu.wordpress.com/2009/12/23/gough-whitlam-dan-perjalanan-politiknya-di-australia-1945-1978/>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2011. Pukul 22.30 WIB.

²⁰ Edib Muslim, *Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Dari Whitlam Sampai Hawke, Dalam Jurnal Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 81.

²¹ Et all, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1995, hlm. 298.

kunjungan kenegaraan ke Australia tepatnya pada tanggal 5-10 Februari 1972.²² Keduanya menjalin kerja sama dalam berbagai bidang. Tahun 1973, Australia memberikan bantuan resmi kepada Indonesia berjumlah 23 juta Dollar Australia. Australia juga memberikan bantuan untuk proyek-proyek dan bantuan tehnik, program bantuan Devisa Kredit, bahan makanan dan barang-barang lainnya, dan pendidikan.²³ Selain dalam bidang di atas, hubungan kerja sama keduanya juga terjalin melalui kerja sama dalam hal perdagangan dan investasi australia, kerja sama pertahanan, dan juga dalam bidang kebudayaan.

Hubungan kedua negara yang terjalin mesra itu harus terganggu dengan adanya isu Timor Timur. Masalah itu muncul ketika Portugal pada tahun 1974 mengalami suatu “revolusi” yang menghasilkan untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada koloninya Timor Timur. Proses dekolonisasi ini jauh dari lancar, Indonesia melihat masyarakat Timor Timur sebagai “saudara mereka yang hilang”. Akibatnya, Indonesia mengintervensi dan pada akhirnya memasukkan bekas koloni portugis ini ke dalam Republik. Ketika Perdana Menteri Australia Gough Whitlam berkunjung ke Indonesia pada tahun 1974, Presiden Soeharto membisikkan masalah isu Timor Timur. Saat itu dilaporkan bahwa Australia tidak keberatan jika wilayah tersebut diintegrasikan secara damai ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi ketika Indonesia menduduki Timor Timur dengan kekerasan, masyarakat Australia menolak cara tersebut. Bahkan Pemerintahan Partai Buruh

²² *Ibid.*, hlm. 274.

²³ Kantor Penerangan Kedutaan Besar Australia, *Hubungan Australia-Indonesia*, Jakarta: Kantor Penerangan Kedutaan Besar Australia, 1981, hlm. 7.

bersikap kritis terhadap tindakan Indonesia dan Australia mengkritik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kritik keras datang dari Serikat Buruh Australia dan sejumlah kelompok sayap kiri. Mungkin peristiwa yang memburukkan hubungan Australia-Indonesia adalah meninggalnya lima wartawan Australia yang meliput suatu peristiwa di Timor Timur. Mereka menyaksikan invasi Indonesia dan diyakini telah dibunuh oleh tentara Indonesia. Dapat dipahami jika pers Australia bersifat kritis terhadap Indonesia dan terutama politik Indonesia terhadap Timor Timur.²⁴

Australia sendiri saat itu sedang mengalami krisis politik yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ketika masalah ini belum selesai, Whitlam dipecat dari kedudukannya sebagai Perdana Menteri oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr pada tanggal 11 Nopember 1975. Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Parlemen dibubarkan oleh Gubernur Jenderal Sir John Kerr, yang kemudian meminta pemimpin oposisi dari Partai Liberal Malcolm Fraser membentuk pemerintah “*care taker*”.²⁵

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan sumber-sumber sebagai berikut, yaitu buku yang berjudul *Hubungan Australia-Indonesia*, buku yang berjudul *30 Tahun Indonesia Merdeka*, buku karya Leo Suryadinata, yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, a.b. Nur Iman Subono, Koran yang terbit sejamin yaitu *Kedaulatan Rakyat*, *Krisis Politik Di*

²⁴ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, a.b. Nur Iman Subono, Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 115-116.

²⁵ *Kedaulatan Rakyat, Krisis Politik Di Australia: PM Whitlam Dipecat Parlemen Dibubarkan, Edisi Rabu Kliwon 12 Nopember 1975 (8 Dulkangidah Alip 1907) Tahun XXXI No. 37*, Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 1975, hlm. 1.

Australia: PM Whitlam Dipecat Parlemen Dibubarkan, Edisi Rabu Kliwon 12 Nopember 1975 (8 Dulkangidah Alip 1907) Tahun XXXI No. 37, serta sumber-sumber lainnya.

F. Historiografi yang Relevan

Dalam penulisan sejarah kritis, penggunaan historiografi yang relevan merupakan suatu hal yang pokok di antara tugas-tugas lain yang harus dikerjakan sebelum melakukan penulisan karya sejarah. Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dari peninggalan masa lampau.²⁶ Pengertian ini menunjukkan bahwa historiografi yang relevan pada dasarnya merupakan karya-karya yang bermuatan sejarah dan bisa berupa disertasi, tesis, skripsi, buku-buku sejarah dan karya-karya lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penulisan skripsi yang berjudul **Hubungan Antara Australia dengan Indonesia Pada Masa Perdana Menteri Gough Whitlam (1972-1975)**, penulis menggunakan historiografi yang relevan sebagai berikut:

Skripsi karya Rudiyanto Setiyawan, mahasiswa Pendidikan Sejarah yang berjudul *Dinamika Kekuasaan Partai Buruh Australia: Studi Kasus Kejatuhan Pemerintahan Whitlam (1972-1975)*. Skripsi ini berisi tentang bagaimana Partai Buruh ketika akan mengikuti pemilu pada tahun 1972. Kemudian membahas

²⁶ Louis Gottschalk, *Understanding History*. Ab. Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI PRESS, 2006, hlm. 39.

mengenai naiknya Whitlam sebagai Perdana Menteri pada tahun 1972-1975. Terakhir membahas mengenai kejatuhan pemerintahan Whitlam pada tahun 1975.

Skripsi Rudiyanto Setiyawan ini, jelas sangat berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Dilihat dari fokus sudut pandangnya saja berbeda. Kalau skripsi Rudiyanto Setiyawan ini sudut pandangnya fokus pada Partai Buruh, bagaimana peran Partai Buruh dan terutama lebih membahas mengenai masalah dalam negerinya. Sementara skripsi penulis disini fokus masalahnya pada dinamika hubungan antara Australia dengan Indonesia saat pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam. Jadi, jika diperhatikan jelas sangat berbeda sekali. Persamaannya hanya pada waktu dan siapa penguasa saat itu. Fokus permasalahannya tetap berbeda.

Dari apa yang sudah penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi penulis berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya. Walaupun ada sedikit kesamaan, yang mana itu hanya terdapat dalam sedikit pembahasan atau orientasinya berbeda dari skripsi yang ditulis oleh penulis. Ada pula perbedaan kurun waktu. sehingga penulis kembali menekankan bahwa skripsi dengan judul **Hubungan Antara Australia dengan Indonesia Pada Masa Perdana Menteri Gough Whitlam (1972-1975)** ini berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya.

G. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Metode penelitian

Dalam penulisan karya sejarah, seorang sejarawan juga membutuhkan yang namanya metode sejarah. Cara kerja sejarawan untuk menganalisis kesaksian

yang ada sebagai bukti yang dapat dipercaya mengenai masa lampau manusia, melihat bahwa jenis bukti yang dicarinya dan cara ia merangkai-rangkaikannya ada pengaruhnya prosedur analitis ini disebut metode sejarah.²⁷ Dalam bukunya Helius Sjamsuddin dikatakan bahwa seorang sejarawan harus mengetahui prosedur-prosedur apa yang harus ditempuh dalam menjangkau informasi, bagaimana ia melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang diperolehnya, harus mengenal sejumlah konsep-konsep yang relevan.²⁸ Penyelidikan yang mempergunakan metode historis adalah penyelidikan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif suatu masalah. Pada umumnya metode historis berlangsung menurut pola sebagai berikut:

pengumpulan data (heuristik), penilaian data (verifikasi/kritik sumber), penafsiran data (interpretasi), dan penyimpulan (penulisan/historiografi).²⁹

Dalam penulisan skripsi ini penulis merujuk pada pembagian metode sejarah menjadi empat bagian, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penyajian.

a. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Menurut Helius Sjamsuddin, segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita tentang suatu kenyataan atau

²⁷ *Ibid*, hlm. 24.

²⁸ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996, hlm. 3.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik Edisi Ketujuh Disempurnakan*, Bandung: Tarsito, 1980, hlm. 132-133.

kegiatan manusia pada masa lalu (*past actually*) disebut sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (*raw materials*) sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan).

Pengetahuan tentang sumber-sumber dan ilmu-ilmu bantu (*auxiliary sciences*) yang membantu sejarawan untuk menemukan, mengetahui dan memahami sumber-sumber itu adalah mutlak perlu. Kajian tentang sumber-sumber adalah suatu ilmu tersendiri dan disebut heuristik.³⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis dalam menghimpun data dan dalam memperoleh sumber yaitu di Perpustakaan St. Kollege Ignatius, di Perpustakaan Daerah Yogyakarta, di Perpustakaan UPT Yogyakarta, di Perpustakaan UPN, di Laboratorium Sejarah FISE UNY, dan masih banyak tempat lainnya.

1) Sumber primer

Menurut Moehar Daniels, bila tanggung jawab terhadap pengumpulan data dan penerbitannya berada dalam satu tangan, data sekunder dinamakan sumber primer.³¹ Sejarawan menganggap bahwa

³⁰ Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 73.

³¹ Moehar Daniels, *Metode Penelitian Social Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 114.

sumber-sumber asli sebagai sumber pertama (*primary sources*).³² Sumber pertama dibagi menjadi dua, yaitu sumber cetakan (ada yang dipublikasikan oleh pemerintah, ada pula oleh non-pemerintah/swasta/individu-individu) dan tidak dicetak atau sumber manuskrip. Sumber-sumber pertama di sini ialah kronik, autobiografi, memoir, surat kabar, publikasi umum, surat-surat pribadi, catatan harian, notulen rapat, sastra.³³ Dalam penulisan skripsi ini, sumber primer yang digunakan oleh penulis yaitu berupa surat kabar yang terbit pada tahun yang sejaman, antara lain:

Kedaulatan Rakyat. 1975. *Kapal Kita Masih Terus Diboikot di Australia, Edisi Senin Legi 3 Nopember 1975 (28 Sawal Alip 1907) Tahun ke XXXI No. 29*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.

Kedaulatan Rakyat. 1975. *Krisis Politik Di Australia: PM Whitlam Dipecat Parlemen Dibubarkan, Edisi Rabu Kliwon 12 Nopember 1975 (8 Dulkangidah 1907) Tahun ke XXXI No. 37*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.

2) Sumber Sekunder

Sedangkan yang telah ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama disebut sumber kedua (*secondary sources*).³⁴ Menurut Moehar Daniels, data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan. Disamping

³² Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 80.

³³ *Ibid*, hlm. 82.

³⁴ Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 80.

itu, data sekunder tersedia dalam bentuk lain, seperti dokumen-dokumen negara, penerbitan, agen-agen perdagangan, balai penelitian, dan lain-lain. Buku-buku juga dapat digolongkan sebagai data sekunder. Prinsipnya data yang telah ada, baik yang diterbitkan atau tidak, dinamakan sekunder. Data sekunder dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Data resmi dikumpulkan oleh kantor-kantor pemerintah, seperti kantor gubernur, kabupaten, kotamadya, dinas-dinas dan instansi.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang didapatkan dari orang kedua yang memperoleh berita dari sumber primer atau sumber lain yang sejamin dengan peristiwa itu. Sumber sekunder yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini antara lain sebagai berikut:

- Crisp, L.F. 1973. *Australian National Government*. Hawtron Victoria Australia: Longman.
- Edib Muslim. 1986. *Politik Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Dari Whitlam Sampai Hawke*. Dalam *Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta: JIP.
- Hadi Soebadio. 2002. *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurnian, George Thomas. 1990. *Facts On File National Profiles: australia and New Zealand*. New York: Facts On File.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto, G. 1992. *Indonesia Abad Ke-20 2: Dari Perang Kemerdekaan Pertama Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius.

³⁵ Moehar Daniels, *op.cit.*, hlm. 113-114.

Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Siboro, J. 1989. *Sejarah Australia*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPLPTK.

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Dalam usaha mencari kebenaran (*truth*), sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Sejarawan harus mengerahkan segala kemampuan pikirannya, bahkan seringkali ia harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu (*skeptis*), percaya begitu saja, menggunakan akal sehat, dan melakukan tebakan inteligen. Fungsi kritik sehingga karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi, manipulasi atau fabrikasi sejarawan. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Dalam metode sejarah dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal.

Kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah. Adalah fungsi dari kritik eksternal memeriksa sumber sejarah atas dasar butir pertama

dan menegakkan sedapat mungkin otentisitas³⁶ dan integritas dari sumber itu. Adapun yang dimaksud dengan kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak.³⁷ Kritik intern digunakan untuk mengkritisi kebenaran isi dari sumber atau untuk mendapatkan kredibilitas dari sumber tersebut.

c. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai biang subjektivitas. Sebagian itu benar, tetapi sebagian salah.³⁸ Interpretasi itu ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber mengandung beberapa kemungkinan. Sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dari data yang terkumpul tentang suatu objek penelitian maka dapat kita temukan fakta dari peristiwa penelitian itu. Kadang-kadang antara data dan

³⁶ Sumber yang melaporkan dengan benar mengenai sesuatu subjek yang tampaknya benar. Semakin banyak diketahui tentang asal-usul dari suatu catatan atau peninggalan, menjadi semakin mudah untuk menegakkan kredibilitass (keandalan) dari catatan atau peninggalan itu. Kredibilitas terletak pada kompetensi dan kebenaran dari saksi mata (*witness*), dan pengetahuan ini acapkali diperoleh dari suatu penelitian mengenai asal-usul sumber itu. Lihat, Helius Sjamsuddin, *op.cit.*, hlm. 106.

³⁷ *Ibid*, hlm. 103-105.

³⁸ Kuntowijoyo, , *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995, hlm. 102-103.

fakta hanya ada perbedaan bertingkat, jadi tidak kategoris. Dalam interpretasi-baik analisis maupun sintesis-orang bisa berbeda pendapat. Perbedaan interpretasi itu sah, meskipun datanya sama.³⁹

d. Penulisan (Historiografi)

Setelah heuristik, verifikasi, dan interpretasi dilalui, maka tugas terakhir peneliti sejarah adalah penulisan sejarah. Penulis karya sejarah mempunyai dua sifat, yaitu tulisan sejarah deskriptif naratif dan tulisan sejarah deskriptif analitis. Deskriptif naratif menguraikan tentang masa lampau dengan merekonstruksi apa yang terjadi sebagai cerita secara proses. Deskriptif analitis merupakan karya sejarah yang berpusat pada masalah atau problem oriente. Penulisan sejarah adalah tingkat klimaks dari kegiatan penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah diinterpretasikan kemudian langkah terakhir penulisan cerita sejarah itu disajikan menjadi suatu karya sejarah.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Sebenarnya, semua tulisan sejarah yang melibatkan penelitian suatu gejala sejarah dengan jangka yang relatif panjang (aspek diakronis) dan yang melibatkan penelitian aspek ekonomi, masyarakat, atau politik (aspek sinkronis) pastilah

³⁹ *Ibid.*, hlm. 103-105.

⁴⁰ Sardiman A.M, Mengenal Sejarah, Yogyakarta: Biograf Publising, 2004, hlm. 106.

memakai juga pendekatan ilmu-ilmu sosial.⁴¹ Segi peninjauan tulisan ini difokuskan pada pendekatan politik, militer, geografi dan ekonomi.

Pendekatan Politik menurut Sartono Kartodirdjo adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan sebagainya.⁴² Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sistem politik seperti apakah yang sedang berkembang saat itu baik di Indonesia, Malaysia, dan Australia.

Pendekatan militer, sangat penting untuk memahami adanya sekelompok orang yang terorganisir dengan disiplin militer dengan tujuan pokoknya mempertahankan kekuasaan.⁴³ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana gerakan militer yang dilakukan Indonesia dalam masalah Timor Timur.

Pendekatan geografi adalah pendekatan yang menerangkan tentang ruang. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui mengenai keterkaitan wilayah antara Indonesia dengan Australia sebagai negara yang wilayahnya berdekatan.

Pendekatan politik penulis mengacu pendapat Sartono Kartodirdjo, yaitu apabila sejarah politik biografi, hendaknya menginterpretasikan pelaku aktor-aktor mentalitas dari kelompok aktor tersebut. Motivasi, sikap, dan tindakan

⁴¹ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 117.

⁴² *Ibid.*, hlm. 4.

⁴³ Nugroho Notosusanto, *Sejarah dan Hankam*, Jakarta: Dephankam, 1968, hlm. 19.

kesemuanya diarahkan oleh orientasi nilai yang diambil kelompok tersebut.⁴⁴ Pendekatan politik dalam skripsi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan Australia maupun Indonesia dalam kurun waktu tersebut dalam dinamika hubungan keduanya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai tulisan ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara ringkas. Sistematika pembahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Pada bab pertama ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode dan pendekatan penelitian, serta sistematika pembahasan. Selanjutnya bab kedua, membahas mengenai hubungan Australia dengan Indonesia pada era sebelum pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam, yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Hubungan Australia dengan Indonesia di bawah Orde Lama. Bab ketiga, membahas mengenai peran Gough Whitlam dalam dunia politik bersama Partai Buruh sebelum menjadi Perdana Menteri Australia, yaitu latar belakang kehidupan Gough Whitlam, sejarah dan latar belakang Partai Buruh Australia, dan peran Gough Whitlam dalam dunia politik bersama Partai Buruh Australia. Bab keempat membahas mengenai hubungan antara Australia dengan Indonesia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Gough Whitlam (1972-1975), yaitu membahas mengenai kerja sama

⁴⁴ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hal. 87.

antara Australia dengan Indonesia, masalah isu Timor Timur, dan jatuhnya pemerintahan Gough Whitlam. Bab kelima membahas mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.